

BAB I PENDAHULUAN

Turki saat ini muncul sebagai kekuatan baru Islam di dunia internasional, negara yang sebelumnya selama puluhan tahun menjadi negara sekuler dan liberal pasca runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani. Kembalinya Turki muncul sebagai kekuatan Islam tidak lepas dari peran Recep Tayyib Erdogan dan Partai AKP yang berhasil mengalahkan Partai CHP (Kemalisme), sejak saat itu Turki banyak merubah kebijakannya terutama kebijakan yang pro terhadap Islam, baik kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri. Namun pada tahun 2016, Turki yang telah membekukan hubungan bilateral dengan Israel sejak tahun 2010 akibat dari insiden Mavi Marmara tiba-tiba memutuskan untuk memulihkan hubungan kembali dengan Israel. Atas dasar kecintaan penulis terhadap Turki dan Islam, maka penulis memilih judul ini sebagai judul skripsi yang bertujuan untuk menganalisa alasan Presiden Erdogan dalam memulihkan hubungan dengan Israel, negara yang jelas-jelas menajajah saudara-saudara kita di Palestina. Hal yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang sudah ada dengan topik yang sama yaitu adanya indikasi bahwa Turki mengalami hambatan dalam negosiasi untuk menjadi anggota Uni Eropa karena adanya pembekuan hubungan bilateral dengan Israel. Kemudian di skripsi ini juga akan menjelaskan bagaimana cara Presiden Erdogan menetralsir kerugian yang akan menimpa Turki ketika memutuskan untuk memulihkan hubungan bilateral dengan Israel.

A. Latar Belakang Masalah

Turki merupakan sebuah negara berdaulat yang juga kelanjutan dari Kekhilafahan Turki Ustmani, sebuah Kekhalifahan Islam terakhir yang diakui dunia. Turki Utsmani memiliki masa kejayaan pada rentang waktu 923-1342 Hijriyah/1517-1922 Masehi, ketika itu Turki Utsmani berhasil menguasai wilayah Asia Kecil,

Semenanjung Balkan, pulau-pulau di Laut Tengah, Mesir, Syam, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, dan beberapa daerah lain yang membentang dari Teluk Persia dan Sungai Dajla di Timur sampai ke Samudera Atlantik di Barat, dari Asia kecil dan Laut Tengah di Utara sampai Khatulistiwa dan Laut Arab di sebelah Selatan (Mughni S. A., 1997, hal. 54-66). Namun kejayaan itu berakhir ketika Turki Ustmani yang saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II memutuskan untuk Turki Ustmani ikut turun dalam perang dunia I dan bergabung dengan Jerman, Austro-Hungaria, dan Bulgaria. Pada Perang Dunia I tersebut Turki berada dipihak yang kalah. Akibat kekalahan tersebut Turki Utsmani banyak kehilangan wilayah kekuasaanya, baik memerdekaan diri maupun jatuh ke tangan pihak Sekutu.

Pada tahun 1922 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Jendral perang Turki Utsmani yaitu Mustafa Kemal Pasha yang mendesak Sultan untuk mundur dan sistem negara diganti menjadi Republik. Di pihak lain, kubu fundamentalis islam meminta supaya Sultan diganti, karena Sultan tidak lagi memerintah dengan hukum Tuhan. Pada tanggal 1 November 1922, Majelis Nasional di Ankara mengeluarkan undang-undang pemisahan antara Khalifah dan Kesultanan. Sehingga Sultan tidak lagi diakui sebagai Khalifah dan ditunjuklah ulama yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang islam sebagai Khalifah. Tanggal 23 Juli 1923 merupakan hari berakhirnya Kekhalifahan Turki Ustmani ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Lausine, yaitu penentuan letak batas Republik Turki dan Kesultanan tidak lagi dianggap sebagai pemerintah (Amalsyah, 2014, hal. 21).

Mustafa Kemal Pasha menjadi presiden Republik Turki yang pertama, ia berusaha melakukan *westernisasi* pada Turki dan membuat Turki menjadi Sekuler seperti bangsa Barat. Lewat paradigma ini Mustafa Kemal Pasha melakukan reformasi kultural secara paksa dan radikal contohnya seperti, pada tahun 1924

Khalifah Islamiah resmi dibubarkan oleh pemerintah Republik Turki. Pada 20 November 1925, dikeluarkan kebijakan pelarangan pakaian tradisional Turki yang bernuansa Islam, kalender Hijriah juga diganti dengan kalender Gregorian. Februari 1926, Majelis Nasional Turki mengadopsi hukum perdata Swiss untuk menggantikan hukum yang dibuat pada masa Turki Ustmani. Lalu pada 19 Agustus 1928, Majelis Nasional mengeluarkan undang-undang penetapan huruf abjad Latin menggantikan huruf abjad Arab. Kemudian bagi umat islam dilarang menggunakan jilbab dan simbol islam lainnya, sehingga umat islam dibatasi dalam menjalankan ritual agamanya.

Setelah wafatnya Mustafa Kemal Pasha pada 10 November 1938, jabatan Presiden Turki digantikan oleh Ismet Inonu sampai tahun 1950. Inonu merupakan pengikut setia dari Mustafa Kemal Pasha, sekaligus pelanjut dari ideologi sekulerisme di Turki. Presiden–presiden Turki setelah Mustafa Kemal Pasha dan Ismet Inonu tetap melanjutkan sekulerisme di Turki, kebijakan sekulerisme tersebut dapat terus berjalan karena partai *Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)* yang didirikan oleh Mustafa Kemal Pasha pada tanggal 7 September 1919 selalu berhasil memenangkan Pemilihan Umum. Baru pada tahun 1995 CHP berhasil dikalahkan dalam pemilu oleh *Refah Partisi*, sebuah partai politik yang berhaluan islam. Namun CHP yang didukung oleh militer Turki merasa tidak terima maka pada tahun 1997 Necmetin Erbakan yang menjabat sebagai Perdana Menteri dilengserkan dan setahun kemudian *Refah Partisi* dibubarkan.

Para politisi kalangan islam dari *Refah Partisi* membentuk *Partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)* pada tanggal 14 Agustus 2001, termasuk didalamnya Recep Tayyip Erdogan. Partai AKP sebagai partai oposisi berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2002. AKP pun menjadi partai yang menguasai pemerintahan dengan

perolehan kursi sebanyak 367 kursi dari total 550 kursi di Parlemen Turki. AKP kembali memenangkan pemilihan umum pada tahun 2007 dan Erdogan terpilih sebagai Perdana Menteriya serta menguasai mayoritas kursi di Parlemen yakni 341 kursi dari 550 kursi (VOA INDONESIA, 2007). Turki dibawah kepemimpinan Erdogan mengalami kemajuan pesat yang membuat Turki kembali disegani sebagai salah satu negara terkuat di Eropa. Hal tersebut membuat nama Erdogan melambung dan masuk sebagai salah satu pemimpin terbaik dunia saat ini. Pada pemilihan umum 2011, AKP kembali mendapat mandat dari masyarakat dan memenangkan pemilu kembali serta Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode berikutnya. Pada tahun 2014, ketika masa jabatannya sebagai Perdana Menteri berakhir Erdogan mencalonkan diri sebagai Presiden Turki yang didukung oleh AKP. Pada pemilihan umum 2014 Erdogan berhasil terpilih sebagai Presiden Turki melalui pemilihan umum.

Erdogan berhasil merebut hati rakyat Turki dengan progam-progam ekonomi serta progam Islamisasi yang mengesankan. Progam Islamisasi tersebut di keluarkan melalui kebijakan-kebijakan politik yang dibawa damai oleh Erdogan sehingga ia dikagumi oleh masyarakat Turki tetapi dibenci oleh kaum sekuler ekstrim. Hingga kini Erdogan terus konsisten dalam menjalankan progam-progam islamisasi, contohnya seperti membebaskan pakaian jilbab diseluruh sektor di Turki, melarang minuman keras atau alkohol, dan lain sebagainya (Marzaman, 2011).

Sedangkan dalam kebijakan luar negeri, Erdogan juga mendukung perjuangan-perjuangan umat islam dunia yang sedang mengalami krisis ataupun konflik. Salah satunya yaitu Palestina, Erdogan sangat vokal dalam menyuarakan dukungan terhadap Rakyat Palestina dan kerap kali mengkritisi kebijakan Israel atas

Palestina. Contohnya, pada tahun 2014 Erdogan dalam sebuah rapat umum ketika perang di jalur Gaza tengah berkecamuk, Erdogan melontarkan kritik terhadap Israel :

“(Israel) tidak memiliki hati nurani, tidak ada kehormatan, tidak ada kebanggaan. Mereka yang mengutuk Hitler siang dan malam telah melampaui kekejaman Hitler” (Sari, 2015).

Meskipun dalam pembuatan kebijakan dalam negeri dan luar negeri pemerintahan Erdogan sangat pro terhadap islam, tetapi pada tahun 2016 Erdogan bersikap ambigu dalam sebuah kebijakan luar negeri. Kebijakan tersebut yaitu pemulihan hubungan bilateral dengan Negara Israel, padahal Israel merupakan negara yang menduduki tanah Bangsa Palestina sehingga kebijakan tersebut bertolak belakang dengan dukungan Erdogan terhadap perjuangan Rakyat Palestina.

Turki dan Israel sendiri sebenarnya telah menjalin hubungan diplomati sejak tahun 1949, Turki berbeda dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya yang menolak kehadiran Negara Israel di Tanah Palestina, sedangkan Turki langsung mengakui kedaulatan Israel. Hubungan Turki dan Israel dimasa pemerintahan Erdogan sempat mengalami pembekuan pada tahun 2010, Turki membekukan hubungan diplomatik dengan Israel dikarenakan Militer Israel melakukan penyerangan terhadap kapal MV Mavi Marmara yang mengangkut bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yg menewaskan 10 aktivis berkewarganegaraan Turki. Turki meminta pemerintah Israel membayar ganti rugi kepada keluarga 10 aktivis tersebut dan wajib meminta maaf secara terbuka atas insiden penyerangan tersebut (Mohamad, 2016). Namun pemerintah Israel menolak untuk meminta maaf dan membayar ganti rugi terhadap korban dari insiden tersebut, sehingga Erdogan membekukan hubungan bilateral Turki dan Israel.

Setelah mengalami pembekuan selama kurang lebih lima tahun, pada tahun 2015 Turki dan Israel menjajaki normalisasi hubungan bilateral. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Erdogan dalam naskah pidato tertulis disurat kabar Turki Kantor Berita AFP, seperti yang dilansir dari merdeka.com:

“Israel membutuhkan negara seperti Turki di kawasan, dan kami pun harus mengakui bahwa Bangsa Turki membutuhkan Israel. Inilah kenyataannya. Jika bisa dicapai langkah yang saling menguntungkan, maka normalisasi bilateral akan mengikuti secara alamiah” (Mohamad, 2016).

Namun pada pertemuan awal Desember 2015, Turki menetapkan syarat-syarat sebelum menormalisasi hubungan bilateral dengan Israel. Syarat-syarat tersebut yaitu, *pertama*, Israel harus membuka blokade terhadap akses darat, laut, dan udara terhadap Penduduk Palestina di Jalur Gaza. *Kedua*, Israel harus meminta maaf atas insiden penyerangan kapal Mavi Marmara pada tahun 2010 serta membayar kompensasi sebesar 20 juta dolar untuk korban luka dan keluarga korban yang tewas. Israel menyanggupi dua syarat tersebut, pengumuman resmi terkait perbaikan hubungan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim pada tanggal 27 Juni 2016 (KOMPAS, 2016). Setelah pemulihan hubungan Erdogan mengutus Kemal Okem yang merupakan seorang diplomat senior Turki untuk mengisi posisi Duta Besar Turki untuk Israel, sedangkan Israel mengutus Eitan Naeh sebagai Duta Besar Israel untuk Turki (Hutapea, 2016). Keputusan Presiden Erdogan dalam pemulihan hubungan bilateral Turki terhadap Israel menjadi hal yang menarik untuk diteliti, terutama untuk mengetahui alasan-alasan rasional dari pemerintah Turki dibalik pemulihan hubungan dengan Israel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan pada skripsi ini yaitu : ***“Mengapa Presiden Erdogan memulihkan hubungan bilateral Turki Terhadap Israel pada tahun 2016 ?”***

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan latar belakang masalah dan kemudian menjawab permasalahan maka dalam kerangka pemikiran ini penulis menggunakan model Aktor Rasional. Model Akor Rasional yaitu sebuah proses kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara tentu saja tidak dibuat dengan sembarangan oleh para pengambil kebijakan di negara tersebut. Kebijakan luar negeri keluar biasanya melalui proses analisis yang panjang dengan data dan fakta yang akurat. Kebijakan luar negeri juga tidak lepas dari kepentingan nasional, dimana suatu negara dalam memutuskan sebuah kebijakan luar negeri tentu memikirkan *feedback* untuk negaranya. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri yang di ambil oleh sebuah negara telah melalui proses kalkulasi untung dan rugi bagi negara tersebut.

Salah satu tokoh yang menganalisis proses kebijakan luar negeri yaitu Graham T. Alisson, dimana dalam jurnalnya yang berjudul *The American Political Science Review (Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis)* (Allison, 1969, hal. 689-718) menyatakan bahwa :

“The assumption of rational behavior not just of intelligent behavior, but of behavior motivated by conscious calculation of advantages, calculation that in turn is based on an explicit and internally consistent value system.”

Dalam menganalisis suatu proses kebijakan luar negeri menurut Graham T. Alisson dapat digunakan Model Kebijakan Rasional (*rational policy model*). Proses

kebijakan itu sendiri secara teoritik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik dan eksternal internasional. Allison membuat kajian politik luar negeri yang revolusioner karena dianggap menantang asumsi rasionalisme dalam politik luar negeri yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi dan sedikit banyak dianut juga oleh realisme dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara. Dalam asumsi rasionalisme, tindakan suatu negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Politik luar negeri dilihat sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional.

Model Aktor Rasional sendiri menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif atau opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent. Model ini dalam pengambilan kebijakannya lebih menekankan kepada peran pihak eksekutif, yaitu Presiden atau Kepala Pemerintahan dari suatu negara. Hal tersebut dikarenakan model Aktor Rasional ini biasanya digunakan pada saat masa krisis, sehingga membutuhkan keputusan sesegera mungkin dengan pertimbangan alternatif-alternatif yang ada. Keputusan yang diambil tentu saja keputusan dengan risiko terkecil dan keuntungan terbesar bagi negara tersebut.

Asumsi dasar perspektif model aktor rasional yaitu bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional di dalam kancah politik global. Dalam model aktor rasional, negara digambarkan sebagai sebuah aktor individu rasional, memiliki

pengetahuan yang sempurna terhadap situasi dan mencoba memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada.

Berbagai tindakan negara-negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara-negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan dimana masing-masing pilihan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi. Negara sebagai aktor rasional akan memilih kebijakan berdasarkan alternatif-alternatif yang ada dengan pertimbangan memiliki konsekuensi paling tinggi (menguntungkan) dan risiko yang paling rendah dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan tentang posisi Turki dibawah kepemimpinan Presiden Erdogan yang mengalami krisis hubungan bilateral dengan Israel. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembekuan hubungan bilateral antara kedua negara sejak tahun 2010. Disatu sisi sebenarnya Turki masih membutuhkan Israel sebagai mitra dagang, karena Israel merupakan salah satu negara dengan nilai ekspor dan impor tertinggi dengan Turki dikawasan Timur Tengah dan Israel juga merupakan negara dengan militer serta persenjataan terkuat di kawasan Timur Tengah sehingga bisa dijadikan aliansi oleh Turki jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian Israel juga bisa menjadi pemulus upaya Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Namun, disisi lainnya Erdogan ingin tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan Erdogan ingin tetap membangun citra didepan negara-negara Islam sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap Islam.

Presiden Turki sebagai pemimpin Turki saat ini bertindak sebagai Aktor Rasional untuk menentukan kebijakan terbaik yang akan diambil untuk

menanggulangi krisis ini. Menurut penulis Presiden Erdogan memiliki dua alternatif yang bisa diambil untuk menyikapi hubungan Turki dan Israel, yaitu sebagai berikut :

1. Turki memulihkan hubungan bilateral dengan Israel meskipun kerap kali mengalami fluktuasi karena beberapa hal.
2. Turki tidak memulihkan hubungan bilateral dengan Israel dan siap menerima semua risiko yang akan dihadapi.

Dari 2 (dua) alternatif yang dapat dipilih oleh Presiden Erdogan tersebut tentu saja ada kalkulasi untung rugi dari setiap alternatif yang ada. Disini penulis telah menganalisis kalkulasi untung rugi dari setiap alternatif yang ada, penulis mjabarkannya melalui tabel berikut :

Tabel 1.1 Kalkulasi Untung dan Rugi dari Semua Alternatif

	Memulihkan Hubungan	Tidak Memulihkan Hubungan
Keuntungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turki tetap bisa menjadikan Israel sebagai mitra dagang yang menguntungkan. 2. Turki tetap bisa menjadikan Israel sebagai aliansi militer jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 3. Turki dapat menjadi penengah jika sewaktu-waktu Negara-Negara Arab berkonflik kembali dengan Israel. 4. Turki tetap bisa melintasi wilayah udara Israel. 5. Turki bisa menjaga peluang agar dapat diterima sebagai anggota Uni Eropa. 6. Turki tetap dapat bernegosiasi dengan Israel terkait keselamatan Rakyat Palestina. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turki akan mendapat apresiasi dari Negara-Negara Islam karena berani tegas terhadap Israel. 2. Turki dapat lebih vokal dalam menyuarakan perjuangan kemerdekaan Palestina. 3. Presiden Erdogan akan semakin mendapatkan citra sebagai pemimpin umat Islam dunia.

Kerugian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Erdogan akan dianggap tidak konsisten oleh masyarakat Islam dunia. 2. Lambat laun Turki akan kehilangan dukungan dari negara-negara Islam karena dianggap kurang serius dalam membela Palestina. 3. Akan muncul gerakan protes dari masyarakat Turki yang fundamentalis Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turki akan kehilangan mitra dagang yang menguntungkan di kawasan Timur Tengah. 2. Turki akan kehilangan negara yang dapat dijadikan aliansi militer jika sewaktu-waktu dibutuhkan di kawasan Timur Tengah. 3. Turki tidak akan bisa mempengaruhi Israel dalam hal kebijakan terhadap rakyat Palestina. 4. Mempersempit peluang Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa karena Israel merupakan mitra Uni Eropa. 5. Turki akan dilarang melintasi wilayah udara Israel.
----------	--	---

Dari kedua alternatif yang dimiliki oleh Presiden Erdogan tersebut, dapat dilihat bahwa alternatif nomor 1 (satu) lah yang memiliki keuntungan paling banyak, yaitu 6 (enam) dan kerugian paling sedikit, yaitu 3 (tiga) dibandingkan dengan alternatif nomor 2 (dua). Sebagai Aktor Rasional, Presiden Erdogan tentu saja mengambil alternatif yang memiliki kalkulasi keuntungan terbesar dan kerugian paling kecil bagi Turki.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis menarik sebuah hipotesa dari penelitian ini bahwa Presiden Erdogan memutuskan untuk memulihkan hubungan birateral dengan Israel karena :

1. Turki diuntungkan dalam menjaga keamanannya karena kekuatan militer dan persenjataan Israel yang sangat menunjang sebagai aliansi militer.

2. Turki diuntungkan karena secara politik akan membantu langkah Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa karena Israel adalah mitra dari Uni Eropa.
3. Turki diuntungkan karena dalam bidang ekonomi akan semakin meningkatkan perdagangan antar kedua negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada (Jatmika, 2016, hal. 88). Pengumpulan informasi dalam metode ini menggunakan fakta-fakta dari data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, *website* dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data-data atau bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, *website* dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan topik yang akan diteliti dan dapat diuji kebenarannya.

3. Teknik Analisa

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang didasarkan pada kajian deskriptif analitis. Sehingga data yang diperoleh kemudian akan dianalisa dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan.

F. Tujuan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, terdapat aspek yang menjadi tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan rasional dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dari Presiden Erdogan untuk memulihkan hubungan bilateral Turki dengan Israel.

G. Batasan penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan dalam skripsi ini dengan judul “Pemulihan Hubungan Bilateral Turki dan Israel di Era Presiden Erdogan Tahun 2016” maka penulis memberikan batasan penelitian berupa batasan pembahasan pada tahun 2010-2016. Dalam kurun waktu tersebut pada tahun 2010 menjadi tahun dimana terjadi pembekuan hubungan bilateral Turki dan Israel dimulai, sementara pada tahun 2016 terjadi pemulihan hubungan bilateral antara Turki dan Israel.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi penjabaran menjadi beberapa bab yang saling memiliki keterkaitan. Berikut adalah perumusan 5 (lima) bab dalam karya skripsi ini :

BAB I akan berisi garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, metode penulisan, tujuan penulisan, batasan penelitian, serta sistematika penulisan bab-bab selanjutnya.

BAB II akan membahas sejarah Turki pasca revolusi, kemudian prinsip-prinsip politik luar negeri Turki sebelum dan saat di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan.

BAB III akan membahas tentang dinamika hubungan bilateral Turki dan Israel.

BAB IV akan membahas alasan-alasan rasional pengambilan kebijakan Presiden Erdogan dalam memulihkan hubungan bilateral Turki dan Israel.

BAB V akan membahas bagian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah.